

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan focus pada penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta pendampingan implementasi PPRG.
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan DPPKBP3A Kabupaten Berau.
3. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan hak anak.
4. Optimalisasi pelayanan KB dan penguatan kapasitas kelembagaan ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
3. Pengembangan data pilah di prioritaskan pada OPD yang terkait dengan isu gender dan anak
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
5. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
6. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
7. Fasilitasi Penyusunan instrument data pilah gender dan anak
8. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
9. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

10. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
11. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
12. Penguatan Kelembagaan P2TP2A
13. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
14. Peningkatan pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan melalui KIE
15. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
16. Pemenuhan hak anak dengan fokus dan peduli dengan Forum anak dan forum peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
17. Upaya fasilitasi pengumpulan data anak
18. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
19. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
20. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kabupaten/kota layak anak.
21. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
22. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
23. Memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak
24. Menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yg komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
25. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mendapatkan pendidikan
26. Menyusun profil melalui pengumpulan data anak dari tingkat kecamatan
27. Memperkuat Advokasi dan KIE tentang KB dan KR di seluruh wilayah
28. Peningkatan Standar kualitas pelayanan tenaga medis
29. KIE dan Advokasi tentang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR)
30. Pelatihan Updating pendataan keluarga
31. Refreshing captor (pencatatan dan pelaporan) bulanan
32. Pelatihan captor yang di perbaharui
33. Pembentukan Kampung KB

34. Peningkatan kualitas PKB/ PLKB dan Kader KB melalui bimbingan teknis dan pelatihan melalui BKKBN
35. KIE dan Advokasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) untuk menurunkan Akseptor KB non MKJP (Metode kontrasespsi jangka panjang)
36. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga
37. Pengembangan /Revitalisasi Peran, Fungsi dan Pengelolaan PIK Remaja dan BKR
38. Peningkatan Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR
39. Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) serta penguatan 8 fungsi keluarga.
40. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
41. Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
42. Peningkatan akses dan pelayanan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Visi :		Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		
Misi :		Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.		
		Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam pembangunan	1).Meningkatnya implementasi pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan KKG dengan focus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau melalui pelaksanaan Perencanaan

Visi :		Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		
Misi :		Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.		
		Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				<p>dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. Pengembangan data pilah di prioritaskan pada OPD yang terkait dengan isu gender dan anak Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan. Fasilitasi Penyusunan instrument data pilah gender dan anak Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada

Visi :		Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		
Misi :		Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.		
		Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
2	Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam pembangunan	2).Meningkatnya lembaga layanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang memenuhi perlindungan khusus	• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.	• Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang • Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) • Penguatan Kelembagaan P2TP2A • Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Peningkatan pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan melalui KIE
		3).Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	• Peningkatan Pelayanan dan pemenuhan hak anak	• Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak. • Pemenuhan hak anak dengan fokus danpeduli dengan Forum anak dan forum peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) • Upaya fasilitasi pengumpulan data anak • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan

Visi :		Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		
Misi :		Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.		
		Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. • Memberikan dukungan sarana,prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak • Menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yg komperhensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. • Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mendapatkan pendidikan • Menyusun profil melalui pengumpulan data anak dari tingkat kecamatan

Visi :		Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		
Misi :		Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.		
		Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana				
3.	Meningkatkan akses layanan keluarga berencana	4).Meningkatnya Keikutsertaan PUS menjadi peserta KB	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pelayanan KB dan penguatan kapasitas kelembagaan ketahanan serta kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan Advokasi dan KIE tentang KB dan KR di seluruh wilayah • Peningkatan Standar kualitas pelayanan tenaga medis • KIE dan Advokasi tentang Keluarga Berencana(KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) • Pelatihan Updating pendataan keluarga • Refreshing captor (pencatatan dan pelaporan) bulanan • Pelatihan captor yang di perbaharui • Pembentukan Kampung KB • Peningkatan kualitas PKB/ PLKB dan Kader KB melalui bimbingan teknis dan pelatihan melalui BKKBN • KIE dan Advokasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) untukmenurunkan Akseptor KB non MKJP(Metode kontrasespsi jangka panjang) • Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga • Peningkatan Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR • Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) serta

Visi :		Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		
Misi :		Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.		
		Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				penguatan 8 fungsi keluarga. <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga • Peningkatan akses dan pelayanan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat.